



PENGHARGAAN-Penjabat Bupati Tabanan I Wayan Sugiada (kanan) menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro.

Berkat WTP, Pemkab Tabanan Terima Penghargaan Menkeu

Menteri Keuangan dalam sambutannya menyatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada kementerian dan lembaga setingkat serta pemerintah daerah yang mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik, khususnya yang meraih opini WTP dari BPK.

Penjabat Bupati Tabanan I Wayan Sugiada mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan tersebut. "Tentu ini patut disyukuri. Sebuah kebanggaan bagi daerah kita karena menerima penghargaan dari pemerintah pusat," ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa dengan diperolehnya penghargaan ini, wajib bagi Pemkab Tabanan untuk mempertahankannya. Begitu juga opini WTP yang telah diraih sebelumnya. "Sepanjang semua pihak di Pemkab Tabanan taat asas dan aturan, saya yakin penghargaan ini bisa dipertahankan, termasuk opini WTP yang baru-baru ini diperoleh," tukasnya.

Rakernas yang diselenggarakan Kementerian Keuangan merupakan kegiatan yang rutin digelar setiap tahun sejak 2008 lalu. Sesuai UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menerapkan akuntansi dalam laporan keuangan. Khusus basis akuntansi aktual harus dilaksanakan paling lambat dalam pelaporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2015. (ad180)

KEBERHASILAN Pemkab Tabanan dalam menyajikan Laporan Keterangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014 tidak hanya berbuah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun ini. Berkat upaya membenahi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara terus-menerus, Pemkab Tabanan juga menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan RI.

Penghargaan itu diterima bersama 148 Pemkab lainnya se-Indonesia yang juga berhasil menyajikan LKPD dengan opini WTP dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 di Gedung Danapala, Kantor Kementerian Keuangan RI, Jumat (2/10) kemarin. Selain untuk Pemkab, penghargaan serupa juga diberikan kepada 62 kementerian, 26 Pemprov, dan 50 Pemkot yang laporan keuangannya pada tahun anggaran 2014 meraih WTP dari BPK. Penghargaan kepada Pemkab Tabanan diberikan langsung oleh Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro kepada Penjabat Bupati Tabanan I Wayan Sugiada didampingi Kabag Keuangan Pemkab Tabanan I Wayan Arimbawa serta Kabag Humas dan Protokol Pemkab Tabanan I Putu Dian Setiawan. Pemberian penghargaan disaksikan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang membuka kegiatan, Ketua BPK RI Harry Azhar Azis, dan seluruh pimpinan lembaga tinggi negara.

Edisi : Sabtu, 3 Oktober 2015

Hal : 12



Mesti Segera Dioperasikan

Pelabuhan Kapal Pesiar Mangkrak

Amlapura (Bali Post) -

Pelabuhan kapal pesiar Tanah Ampo, Manggis, Karangasem yang mangkrak mesti segera dioperasikan. Sebab, ratusan miliar investasi tertanam di proyek dermaga ini. Malah pelabuhan ini dikhianatkan karena penghasilan nelayan menurun.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Karangasem I Gede Dana, Jumat (2/10) kemarin di Karangasem. Gede Dana yang mantan Ketua DPRD Karangasem itu mengaku prihatin, karena pihaknya mendapatkan informasi masyarakat di Labuan bahwa sejak adanya dermaga kapal pesiar yang menjorok ke laut sepanjang 150 meter itu, penghasilan nelayan setempat justru turun. Nelayan jarang mendapatkan ikan.

Menurut Gede Dana, agar

warga Labuan dan sekitarnya mendapatkan lahan pekerjaan baru, dia minta Pemkab Karangasem melakukan lobi ke pusat. Tujuannya agar pelabuhan itu dilanjutkan pembangunannya kemudian dioperasikan.

Dari catatan, pelabuhan itu dibangun tahun 2008. Bangunan atau lantai dermaga dibangun pusat, sementara Pemprov Bali membangun gedung-gedung untuk administrasi dan ruang tunggu penumpang wisman. Sementara Pemkab Karangasem membebaskan lahan masyarakat untuk jalan lingkar dan penghotmikan jalan itu. Lebih dari Rp 300 miliar anggaran sudah tersedot ke sana. Namun sudah tujuh tahun, pelabuhan itu belum berfungsi alias mangkrak. Demikian juga bangunan pasar seni penduduknya yang dibangun di

depan kuburan Desa Manggis, tetap mangkrak. Pelabuhan itu pernah tiga kali diuji coba dengan minta kapten kapal pesiar besar lego jangkar di tengah laut. Ribuan penumpang kapal pesiar yang umumnya kalangan lanjut usia itu dioper ke sekoci untuk didaratkan melalui jembatan ponton. Jembatan ponton sudah dibeli dua buah, dan keduanya sudah hancur karatan dan menjadi besi rongsokan.

Operator atau kapten kapal tak berani langsung menyandar di lantai dermaga itu. Selain lantai dermaga masih pendek hanya 150 meter, arus dan ombak di Labuan Amuk itu juga dikenal ganas. Perlu lantai dermaga minimal 300 meter untuk bisa kapal pesiar besar bersandar di sana, selain air laut juga mesti tenang seperti air kolam agar

penumpang kapal bisa naik dan turun dengan aman.

Dilain pihak, Bendesa Tanah Ampo, Gede Suyadnya, mengaku warga nelayan di desanya turun drastis penghasilannya. Padahal, 90 persen warganya nelayan, dengan memarkir perahu di sepanjang pantai itu. Namun, sejak dibangun dermaga itu, hasil tangkapan nelayan turun drastis. Setahun, hanya satu kali panen atau mendapatkan ikan banyak. Sementara dulu, setahun, tiga atau empat kali panen. Bahkan sekali melaut, seorang nelayan bisa empat sampai lima ton dapat ikan. "Dulu saat panen melimpah, nelayan sampai mengembalikan lagi ikannya ke laut, karena terlalu banyak dan tak ada yang mau membeli. Kini sebaliknya, jarang dapat ikan banyak. Nelayan kami mengeluh," katanya.

Dia mengaku tak tahu kenapa kini di laut itu paceklik ikan. Dia menduga, keberadaan dermaga itu menjadi salah satu sebab. Soalnya, nelayan juga tak berani terlalu dekat dermaga menangkap ikan membawa perahu. Selain takut perahunya dibenturkan ombak atau arus laut ke tiang dermaga karena arus dan ombak ganas, jaring atau pancing juga bisa tersangkut di tiang dermaga. "Dulu ada warga kami yang jatuh dari lantai dermaga saat naik sepeda. Ternyata pria yang pintar berenang itu, hendak mencari batu ke darat dengan naik sepeda, guna dipakai melepaskan pancingnya yang tersangkut di tiang termaga. Namun apes, dia tercebur ke laut dan sampai kini mayatnya tak pernah ditemukan," tandas Suyadnya. (013)

Edisi : Sabtu, 3 Oktober 2015

Hal : 13



Pemkot Denpasar Raih Penghargaan Kemenkeu

Raih Predikat WTP 3 Kali Berturut

KEBERHASILAN Pemkot Denpasar dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, bersih dan akuntabel mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya, Pemkot Denpasar mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 3 kali berturut turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali karena dinilai telah berhasil dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Ini sekaligus mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Provinsi Bali. Penyerahan Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Bambang Permedi Soemantri Brodjonegoro, Jumat (2/10). Pemkot Denpasar telah meraih opini WTP dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 di gedung Dhanapala Kemenkeu RI, yang diterima langsung Pj. Walikota A.A Gede Geriya.

Penyerahan penghargaan ini dalam rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015 yang dihadiri 50 Walikota dan 150 Bupati Seluruh Indonesia. Dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 lalu Denpasar kembali meraih WTP yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Bali Arman Syifa.

Tentu dari penilaian ini BPK RI Perwakilan Bali menilai pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Denpasar layak mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena telah mencapai kemajuan yang signifikan, dengan



komitmen dan upaya Pemerintah Kota Denpasar menerapkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dan muaranya adalah berjalannya sistem pemerintahan yang diharapkan mampu mensejahterakan rakyatnya.

Pj. Walikota Denpasar A.A Gede Geriya usai menerima penghargaan didampingi Kabag Keuangan Setda Kota Denpasar I Made Widra, Kepala Inspektorat Kota Denpasar I.B Sidhartha Putra menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh jajaran di Lingkungan Pemkot Denpasar yang telah bekerja dengan baik dalam mengelola keuangan daerah.

Menurut Pejabat asal Gianyar ini, keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar Kota Denpasar ini juga tidak terlepas dari kerja keras birokrasi dan aparatur di Pemkot Denpasar yang didukung kualitas SDM yang semakin meningkat. Oleh karena itu Gede Geriya mengharapkan kedepan penghargaan ini hendaknya dipakai motivasi dan penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi, sehingga upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai. (adv)

Edisi : Sabtu, 20 Oktober 2015

Hal : 24



Tiga Kali Berturut-turut Raih WTP

Pemkot Dapat Penghargaan dari Kemenkeu RI

KEBERHASILAN Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan, bersih dan akuntabel, mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI). Sebelumnya, Pemkot Denpasar mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali, karena Pemkot Denpasar dinilai telah berhasil dalam pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penilaian pengelolaan keuangan Pemkot Denpasar yang telah menerapkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Provinsi Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Bambang Permedi Soemantri Brodjonegoro, Jumat (2/10) kemarin, kepada Pemkot Denpasar di Gedung Dhanapala Kemenkeu RI, yang diterima langsung Pj.

Wali Kota A.A. Gede Geriya. Penyerahan penghargaan ini dalam rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015 yang dihadiri 50 wali kota dan 150 bupati seluruh Indonesia.

Dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 lalu, Denpasar kembali meraih WTP yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Bali Arman Syifa. BPK RI Perwakilan Bali menilai, pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Denpasar layak mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena telah mencapai kemajuan yang signifikan. Dengan komitmen dan upaya Pemerintah Kota Denpasar menerapkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, dan muaranya adalah berjalannya sistem pemerintahan yang diharapkan mampu menyejahterakan rakyatnya.

Pj. Wali Kota Denpasar A.A. Gede Geriya usai menerima penghargaan didampingi Kabag Keuangan Setda Kota Denpasar I

Made Widra, Kepala Inspektorat Kota Denpasar I.B. Sidharta Putra, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemkot Denpasar yang telah bekerja

dengan baik dalam mengelola keuangan daerah serta BPK RI beserta jajarannya yang selama ini terus membimbing dan mengarahkan sehingga pengelolaan keuangan, barang dan jasa di

Kota Denpasar dapat terwujud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut pejabat asal Gianyar ini, keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar ini juga tidak terlepas dari kerja keras birokrasi dan aparatur di Pemkot Denpasar yang didukung kualitas SDM yang semakin meningkat.

Oleh Karena itu, Gede Geriya mengharapkan ke depan penghargaan ini hendaknya dipakai motivasi dan penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi. Sehingga, upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai. Di samping itu, kerja sama dan bimbingan dari BPK RI dan jajarannya dapat terus ditingkatkan. Keberhasilan ini menambah sederet prestasi yang telah mampu diraih Pemerintah Kota Denpasar, baik berskala daerah, regional, maupun nasional. "Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat di Kota Denpasar dalam ikut berpartisipasi mempercepat proses pembangunan," ujar A.A. Gede Geriya. (ad177)



PENGHARGAAN - Menkeu Bambang Permedi Soemantri Brodjonegoro menyerahkan penghargaan kepada Pemkot Denpasar yang diterima langsung Pj. Wali Kota A.A. Gede Geriya di Gedung Dhanapala Kemenkeu RI, Jumat (2/10) kemarin.

Edisi : Sabtu, 3 Oktober 2015

Hal : 2